

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki umum dan dapat dijual kembali ke masyarakat umum. Setiap perusahaan harus dikelola oleh orang yang sudah paham prinsip-prinsip yang kompleks mengenai *good corporate governance*, yaitu kontribusi para pemegang saham, direktur, dan manajer lainnya dalam pengambilan keputusan. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang dapat mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi berbadan hukum.

Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Selain itu juga tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pihak-pihak utama yang terkait dalam tata kelola perusahaan adalah shareholder, manajemen, dan dewan direksi. Adapun pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan serta masyarakat luas. Para pelaku usaha yang ada di Indonesia telah bersepakat bahwa dengan adanya sistem tata kelola diharapkan perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya pembuatan keputusan perusahaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi biaya dalam suatu organisasi berbadan hukum dan mampu meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Suatu organisasi saling berusaha mendapatkan sumber pemasukan yang didapat dari pihak-pihak luar untuk mendukung kegiatan usahanya. Faktor-faktor yang dapat dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan yaitu kinerja keuangan yang ada didalam perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan adalah hasil kerja berbagai bagian dalam suatu perusahaan yang bisa dilihat pada kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu terkait aspek penghimpunan dan penyaluran dana yang dinilai berdasarkan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Kinerja keuangan dapat diartikan juga sebagai gambaran pencapaian perusahaan berupa hasil yang telah dicapai melalui berbagai aktivitas untuk meninjau sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan standar akuntansi keuangan secara baik dan benar yang mencakup tujuan dan contoh analisis laporan keuangan.

Sutrisno (2009:53) menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan pada periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Fahmi (2012:02) mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran tentang keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan.

Rudianto (2013:189) juga berpendapat bahwa kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama waktu yang telah ditentukan. Ukuran kinerja keuangan dalam suatu perusahaan diperlukan untuk dapat mengetahui seberapa kecil atau besarnya tingkat keberhasilan keputusan yang di buat oleh manajer keuangan. Kasmir (2016:106) berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan dan arti tertentu.

Kinerja keuangan perusahaan berhubungan erat dengan pengukuran dan juga penilaian kinerja, pengukuran kinerja adalah kualifikasi, efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mengelola perusahaan selama periode penagihan. Kinerja keuangan yang baik dapat memberikan impact yang positif bagi kelangsungan hidup perusahaan, selain itu para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya juga akan lebih percaya atau yakin untuk menanamkan modal atau sahamnya di suatu perusahaan yang bersangkutan.

Peran dari sumber dana yang didapat dari pihak luar sering kali menimbulkan masalah untuk perusahaan itu sendiri, misalnya para manajer berusaha melakukan manipulasi laba yang bertujuan memberikan manfaat untuk kebutuhan pribadi. Tingkah laku manajemen yang mengendalikan laba sesuai dengan kebutuhan pribadinya biasa disebut dengan manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung-jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang.

Praktik manajemen laba merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pihak manajemen yaitu merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan memperlakukan metode dan prosedur akuntansi yang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau yang biasa disebut *financial distress* bahkan apabila dilakukan dalam jangka panjang dapat mengalami kebangkrutan. Dengan adanya praktik manajemen laba ini pasti diperlukan adanya sistem pengawasan dan pengendalian efektif yang dilakukan dewan komisaris independen dan komite audit.

Menurut Wirakusuma (2016:11) manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. Tindakan Manajemen Laba semakin meningkat dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar. Beberapa fenomena manajemen laba yang menarik akhir-akhir ini adalah sebagai berikut.

I Gede Nyoman Yetna (2020,) selaku Direktur Penilaian perusahaan BEI mengatakan saat ini masih melakukan peninjauan kembali laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk per 31 desember 2019. Sjambiri Lioe selaku koordinator finance PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, mengaku bahwa dirinya yang diperintahkan untuk menaikkan nilai piutang oleh Joko Mogoginta selaku mantan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.dengan adanya penggelembungan pos akuntansi senilai Rp 4 triliun. Perbedaan informasi antara data internal dengan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit memiliki beberapa poin penting. Poin-poin itu diantaranya yang pertama, terdapat dugaan overstatement sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap dan sebesar

Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA entitas food. Yang kedua, terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Yang ketiga terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (*disclosure*) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan. (Bisnis.com, Jakarta)

Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (2019) selaku Komisaris Garuda Indonesia menolak menandatangani laporan buku tahunan Garuda 2018. Mereka tidak sepakat dengan salah satu transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahat) terkait penyediaan koneksi wifi dalam pesawat. Kerja sama yang ditandatangani pada 31 oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar USD 239.940.000 dari Mahata. Namun oleh pihak Garuda Indonesia transaksi pencatatan piutang sebagai pendapatan. Garuda Indonesia mencatatkan piutang dari transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahat) terkait penyediaan koneksi wifi dalam pesawat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018 sebesar US\$ 239,94 juta padahal pihak Garuda Indonesia belum mendapatkan bayaran dari Mahata atas kerja sama yang dilakukan. Namun pihak manajemen tetap mencatatkan sebagai pendapatan sehingga secara akuntansi Garuda Indonesia memperoleh laba bersih dari sebelumnya yang rugi sebesar US\$ 216,58 juta. (Jakarta, CNN Indonesia)

Fakhri Hilmi (2020) selaku Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa PT Timah Tbk (TINS) baru saja merilis laporan keuangan tahun 2019, Rabu (15/4/2020). Di luar rugi bersih Rp 611,28 miliar di tahun 2019, manajemen Timah merevisi data laporan keuangan tahun 2018 yang disajikan kembali. manajemen Timah melakukan revisi yang cukup signifikan. Bila sebelumnya laba bersih TINS per 31 Desember 2018 berjumlah Rp 531,35 miliar, kini nilainya direvisi menjadi Rp 132,29 miliar. Revisi itu menyebabkan laba bersih TINS tahun 2018 turun 73,67 persen jika dibandingkan perolehan tahun 2017 yang sebesar Rp 502,43 miliar. Sebelum revisi, laba bersih TINS tahun 2018 naik 5,76 persen jika dibandingkan perolehan tahun 2017. Alasan PT Timah melakukan revisi karna salah melakukan pencatatan dalam

laporan keuangan seperti kurang catat beban pokok pendapatan atas penjualan logam timah, saldo properti investasi yang tidak tepat. (Jakarta, Kompas.com)

Sofyan Djajil (2009) sebagai Menteri BUMN meminta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) untuk memberikan sanksi kantor akuntan publik jika terbukti terlibat dalam rekayasa keuangan. Kasus ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun lalu. Direktur Utama baru, M.Choliq menemukan pencatatan yang tak sesuai. PT Waskita Karya yang termasuk subsektor konstruksi bangunan. Laporan keuangan PT Waskita dimanipulasi oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 Kantor Akuntan Publik. PT Waskita diketahui memiliki kelebihan laba bersih sebesar Rp500 miliar. Hal ini diketahui saat dilakukan audit laporan keuangan seiring pergantian direksi pada tahun 2008. Direksi melakukan rekayasa pada laporan keuangan dengan memasukkan pendapatan tahun depan ke pendapatan tahun lalu. Pada akhirnya kementerian BUMN memberhentikan dua direksi PT Waskita Karya. (Tempo *Interaktif*, Jakarta)

Ketua BPK Agung Firman Sampurna (2020) melihat adanya kecurangan manipulasi laba sebesar Rp 360,3 miliar pada tahun 2006 pada laporan keuangan Asuransi Jiwasraya. Pada saat pembukaan laba keuangan Asuransi Jiwasraya mendapat opini dimodifikasi. Apabila jiwasraya melakukan pencadangan maka akan terlihat kerugian sebesar Rp 15,3 triliun, namun BPK menyatakan bahwa ada kecurangan dalam pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun. Pada tahun 2018 PT Asuransi Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun dan hingga september 2019 diperkirakan kerugian sebesar Rp 17,3 triliun, kemudian pada posisi november 2019 diperkirakan mengalami negatif equity sebesar Rp 27,2 triliun. Bahkan BPK menilai adanya rekayasa juga pada transaksi jula beli saham yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya, atas tindakan ini ada indikasi kerugian terkait saham reksadana pada Asuransi Jiwasraya hingga Rp 6,4 triliun. (Jakarta, CNBC Indonesia)

Dengan adanya beberapa kasus terkait praktik manajemen laba, maka perusahaan akan berupaya menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik agar dapat mengurangi atau bahkan mencegah tindak manajemen laba dalam suatu perusahaan. Salah satu persyaratan implementasi *good corporate governance* perusahaan di Indonesia adalah adanya keberadaan komite audit dalam suatu organisasi perusahaan. Setiap perusahaan telah diwajibkan untuk memiliki komite audit. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan sebuah perusahaan.

Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal karena memiliki peran yang sangat penting dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Komite audit merupakan komponen yang baru dalam sistem pengendalian sebuah perusahaan. Komite audit memiliki tugas terpisah untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam membantu dewan komisaris untuk memberikan pengawasan secara menyeluruh. Komite audit yang ada di dalam perusahaan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh pihak manajemen. Apabila suatu perusahaan terkena kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*, komite audit tentunya akan semakin memperketat pengontrolan dan pengawasan laporan keuangan kepada para manajer. Keefektifan komite audit dalam mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan dan internal auditor akan sangat berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba. Apabila komite audit secara terus-menerus melakukan pengontrolan dan pengawasan maka pihak manajemen tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Selain komite audit, perusahaan pun wajib memiliki dewan komisaris independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Keberadaan dewan komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap saja, namun adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi kecenderungan para manajer melakukan kecurangan laporan keuangan karena dalam diri komisaris independen melekat tanggung jawab secara hukum atau yuridis. Melalui perannya, komisaris independen dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun

laporan keuangan sehingga diperoleh laporan keuangan yang berkualitas yang dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, banyak sekali perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang akan berdampak pada kebangkrutan perusahaan. Perusahaan melakukan manajemen laba agar perusahaan yang mengalami *financial distress* tidak benar-benar mengalami kebangkrutan. Peristiwa jatuhnya kondisi perusahaan yang disebabkan oleh *financial distress* hampir tidak ada akhirnya, seperti terjadinya pengurangan dividen, penutupan perusahaan itu sendiri, kerugian-kerugian, pemecatan, pengunduran diri direksi dan jatuhnya harga saham.

Berdasarkan penelitian Wahyuningsih (2020:238) mengemukakan penelitian tentang “pengaruh struktur *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dan manajemen laba”, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengujian secara parsial pada pengujian model I, kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap manajemen laba dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pengujian model II, dewan komisaris berpengaruh negative terhadap manajemen laba, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil pengujian model III, membuktikan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Manajemen laba tidak mampu memediasi pengaruh struktur GCG terhadap kinerja perusahaan.

Sedangkan Maknunah (2016:64) mengemukakan tentang “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Pengungkapan *Good Corporate Governance* terhadap dugaan praktik manajemen”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variable kepemilikan Kepemilikan keluarga, Kepemilikan institusi berpengaruh negative signifikan terhadap dugaan praktik manajemen laba. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap dugaan praktik manajemen laba sedangkan Kepemilikan asing, *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba secara silmutan, variable kepemilikan keluarga, kepemilikan

institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan good corporate governance berpengaruh terhadap dugaan praktik manajemen

Menurut penelitian Prasetyo *et all* (2017:33) dalam jurnal berjudul “Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan *Good Corporate* Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan komisaris independent memoderasi negatif pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan, sedangkan komite audit dan kualitas audit tidak memoderasi negatif pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Manajemen laba Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Logam & Mineral yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah Kepemilikan Instusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah Manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
6. Apakah Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Manajemen Laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?